

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SOPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD	9
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan SKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja SKPD	15
3.3 Program Dan Kegiatan	15
3.4 Program Dan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2023) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karenanya kami berharap saran serta masukan dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini akan lebih baik dan terarah.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, Juli 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



FAKHRIYANTO. S.P.T. MP

Pembina TK.I / IV B

NIP. 19780601 200501 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah kabupaten Balangan untuk periode Perubahan APBD 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang merujuk kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berdasarkan kepada kondisi, potensi, dan permasalahan serta kebutuhan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang pada akhirnya akan bermuara kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan mengacu pada Renstra dan RKPD tahun berkenaan.

Dokumen Renja ini menjadi dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah untuk memasukkan program/kegiatan didalam KUA dan Perubahan PPAS 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan untuk APBD , Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan RKA Tahun 2023.
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi sejauhmana capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan instansi pada Tahun berkenaan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses

penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan semester I, evaluasi capaian Renstra sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 di mulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD;
- b. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan 2023 didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

RENJA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 memuat Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan rencana Program dan kegiatan dalam perubahan Renja SKPD. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
10. Peraturan Gubernur kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 Tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2023;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan ke empat atas peraturan Bupati Balangan Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini adalah dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023. Dan Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan);
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026;

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dilakukan setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan berpedoman pada :

1. Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II.

Penyusunan Renja-P SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan arahan atau acuan bagi pelaksana program dan kegiatan guna tercapainya sasaran dan perencanaan pembangunan dan memfasilitasi dan upaya bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Adapun visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Balangan adalah sebagai berikut :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Kabupaten Balangan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan Kualitas dan layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, Budaya dan agama serta Pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2023 yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabuapten Balangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	80 (BB)Nilai	152.110.003.710	70.04 (BB)Nilai	14.807.143.763	72 (BB)Nilai	28.865.630.842	69,95 (BB)Nilai	6.943.438.653	69,95 (BB)Nilai	11.125.986.330	69,95 (BB)Nilai	11.125.986.330	97,15	38,54	69,95 (BB)Nilai	11.125.986.330,00	87,44	7,31	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500 %	1.548.213.617	100 %	144.376.300	100 %	266.957.800	25 %	29.924.000	50 %	77.754.000	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	
1.	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	302.113.257	2 Dokumen	23.862.200	2 Dokumen	52.021.800	1 Dokumen	8.124.000	1 Dokumen	10.554.000	1 Dokumen	10.554.000	50,00	20,29	3 Dokumen	34.416.200,00	30,00	11,39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	30 Laporan	861.585.844	6 Laporan	86.622.100	6 Laporan	134.483.400	1 Laporan	15.800.000	3 Laporan	48.400.000	3 Laporan	48.400.000	50,00	35,99	9 Laporan	135.022.100,00	30,00	15,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	384.514.516	1 Laporan	33.892.000	1 Laporan	80.452.600	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	18.800.000	1 Laporan	18.800.000	100,00	23,37	2 Laporan	52.692.000,00	40,00	13,70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															66,67	26,55			33,33	13,59		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan	500 %	78.329.374.278	100 %	7.694.492.471	100 %	14.436.428.742	0 %	2.087.024.158	50 %	5.369.256.179	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00		
4.	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3480 Orang/Bulan	75.188.981.931	696 Orang/Bulan	7.622.408.721	696 Orang/Bulan	13.908.897.342	174 Orang/Bulan	2.087.024.158	348 Orang/Bulan	5.276.318.706	348 Orang/Bulan	5.276.318.706	50,00	37,93	1044 Orang/Bulan	12.898.727.427,00	30,00	17,16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajian / Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	650.428.397	6 Dokumen	24.513.100	6 Dokumen	146.795.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	52.732.800	3 Dokumen	52.732.800	50,00	35,92	9 Dokumen	77.245.900,00	30,00	11,88	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
6.	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	355.751.745	6 Laporan	21.365.900	6 Laporan	70.736.700	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00	0,00	6 Laporan	21.365.900,00	20,00	6,01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
7.	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30 Laporan	2.134.212.205	6 Laporan	26.204.750	6 Laporan	309.999.700	0 Laporan	0	3 Laporan	40.204.673	3 Laporan	40.204.673	50,00	12,97	9 Laporan	66.409.423,00	30,00	3,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															37,50	21,71			27,50	9,54		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi kepegawaian	500 %	15.171.375.788	100 %	2.803.009.538	100 %	1.667.447.400	0 %	265.211.600	50 %	423.013.600	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00		
8.	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	807.490.368	1 Paket	35.098.000	1 Paket	233.648.000	1 Paket	125.370.000	1 Paket	125.370.000	1 Paket	125.370.000	100,00	53,66	1 Paket	125.370.000,00	20,00	15,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
9.	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	372.832.420	200 Orang	9.916.500	200 Orang	350.799.400	0 Orang	17.786.800	60 Orang	22.846.800	60 Orang	22.846.800	30,00	6,51	260 Orang	32.763.300,00	26,00	8,79	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
10.	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	13.991.053.000	320 Orang	2.757.995.038	320 Orang	1.083.000.000	0 Orang	122.054.800	160 Orang	274.796.800	160 Orang	274.796.800	50,00	25,37	480 Orang	3.032.791.838,00	150,00	21,68	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															60,00	28,51			65,33	15,33		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampal Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	500 %	10.299.675.437	100 %	2.082.596.394	100 %	4.515.732.700	0 %	558.403.400	50 %	673.276.585	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
11.	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	546.235.518	1 Paket	31.855.000	1 Paket	142.989.200	1 Paket	3.542.500	1 Paket	3.542.500	1 Paket	3.542.500	100,00	2,48	1 Paket	3.542.500,00	20,00	0,65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
12.	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.628.264.052	1 Paket	1.553.406.357	1 Paket	2.363.718.500	1 Paket	449.600.000	1 Paket	452.850.000	1 Paket	452.850.000	100,00	19,16	1 Paket	452.850.000,00	20,00	5,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
13.	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	82.648.502	1 Paket	2.750.000	1 Paket	33.213.000	1 Paket	8.753.800	1 Paket	8.753.800	1 Paket	8.753.800	100,00	26,36	1 Paket	8.753.800,00	20,00	10,59	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
14.	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Dokumen	153.191.350	360 Dokumen	0	360 Dokumen	31.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00	0,00	360 Dokumen	0,00	100,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
15.	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1730 Laporan	1.889.336.015	346 Laporan	494.585.037	346 Laporan	1.944.312.000	87 Laporan	96.507.100	174 Laporan	208.130.285	174 Laporan	208.130.285	50,29	10,70	520 Laporan	702.715.322,00	30,06	37,19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				70,06	11,74			38,01	10,87					
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan	500 %	27.799.590.000	100 %	0	100 %	4.990.000.000	0 %	3.846.728.200	50 %	4.206.524.200	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
16.	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Unit	27.799.590.000	9 Unit	0	38 Unit	4.990.000.000	15 Unit	3.846.728.200	28 Unit	4.206.524.200	28 Unit	4.206.524.200	73,68	84,30	37 Unit	4.206.524.200,00	37,00	15,13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				73,68	84,30			37,00	15,13					
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan	500 %	6.238.728.849	100 %	446.155.532	100 %	1.320.063.600	0 %	120.450.541	50 %	275.307.680	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
17.	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.122.688.488	12 Laporan	383.681.932	12 Laporan	701.968.000	3 Laporan	72.500.541	6 Laporan	135.257.680	6 Laporan	135.257.680	50,00	19,27	18 Laporan	518.939.612,00	30,00	16,62	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
18.	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	797.501.361	12 Laporan	54.520.000	12 Laporan	172.921.000	3 Laporan	2.350.000	6 Laporan	2.850.000	6 Laporan	2.850.000	50,00	1,65	18 Laporan	57.370.000,00	30,00	7,19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
19.	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	2.318.539.000	12 Laporan	7.953.600	12 Laporan	445.174.600	3 Laporan	45.600.000	6 Laporan	137.200.000	6 Laporan	137.200.000	50,00	30,82	18 Laporan	145.153.600,00	30,00	6,26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				50,00	17,25			30,00	10,02					
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan	Lancarnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan	500 %	12.723.045.741	100 %	1.636.513.528	100 %	1.669.000.600	25 %	35.696.754	50 %	100.854.086	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
20.	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	100 Unit	3.960.546.887	20 Unit	287.569.172	20 Unit	999.791.400	5 Unit	28.554.454	10 Unit	91.367.286	10 Unit	91.367.286	50,00	9,14	30 Unit	378.936.458,00	30,00	9,57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
21.	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	4.609.089.740	0 Unit	0	10 Unit	57.500.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12			15=14/5x100%	
22.	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4.153.409.114	20 Unit	1.348.944.356	20 Unit	611.709.200	5 Unit	7.142.300	10 Unit	9.486.800					10 Unit	9.486.800	50,00	1,55	30 Unit	1.358.431.156,00	150,00	32,71	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	33,33	3,56			60,00	14,09				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	50,00	0,00			10,00	0,00				
Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.	5.02.02	PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PENGELOLAAN PERUBAHAN DAERAH	90 %	1.698.368.101.030	87 %	247.724.568.920	87 %	322.987.754.370	78,738 %	50.673.137.590	78,738 %	89.921.362.880					78,738 %	89.921.362.880	90,50	27,84	78,738 %	89.921.362.883,00	87,49	5,29	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	500 %	14.933.547.670	100 %	1.469.554.622	100 %	2.987.984.900	25 %	117.486.511	50 %	616.417.908					50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	772.198.820	2 Dokumen	88.510.115	2 Dokumen	145.743.000	1 Dokumen	6.777.400	1 Dokumen	19.406.200					1 Dokumen	19.406.200	50,00	13,32	3 Dokumen	107.916.315,00	30,00	13,98	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perintah KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	769.547.570	2 Dokumen	87.005.600	2 Dokumen	113.810.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0,00	0,00	2 Dokumen	87.005.600,00	20,00	11,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	4.996.377.253	30 Dokumen	452.065.958	30 Dokumen	973.853.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0,00	0,00	30 Dokumen	452.065.958,00	20,00	9,05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	195.927.260	30 Dokumen	23.112.900	30 Dokumen	82.321.000	30 Dokumen	2.969.800	30 Dokumen	2.969.800					30 Dokumen	2.969.800	100,00	3,61	60 Dokumen	26.082.700,00	40,00	13,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.806.755.800	2 Dokumen	184.878.873	2 Dokumen	421.780.000	1 Dokumen	9.882.600	1 Dokumen	25.167.100					1 Dokumen	25.167.100	50,00	5,97	3 Dokumen	210.045.973,00	30,00	11,63	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.795.637.670	2 Dokumen	184.351.400	2 Dokumen	245.926.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.760.200					1 Dokumen	1.760.200	50,00	0,72	3 Dokumen	186.111.600,00	30,00	10,36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	4.597.103.297	2 Dokumen	449.629.776	2 Dokumen	1.004.551.900	1 Dokumen	97.856.711	1 Dokumen	567.114.608					1 Dokumen	567.114.608	50,00	56,45	3 Dokumen	1.016.744.384,00	30,00	22,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	42,86	11,44			28,57	13,11				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Sistem Perbendaharaan Daerah	500 %	15.342.804.176	100 %	1.369.596.691	100 %	3.989.670.800	25 %	880.580.785	50 %	1.192.932.145					50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	2.442.651.990	12 Dokumen	183.826.300	12 Dokumen	377.590.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	52.306.000					6 Dokumen	52.306.000	50,00	13,85	18 Dokumen	236.132.300,00	150,00	9,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	661.724.117	12 Dokumen	227.872.130	12 Dokumen	197.571.400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0,00	0,00	12 Dokumen	227.872.131,00	20,00	34,44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	500 Dokumen	1.914.561.012	0 Dokumen	0	100 Dokumen	1.262.972.000	0 Dokumen	0	50 Dokumen	24.042.700					50 Dokumen	24.042.700	50,00	1,90	50 Dokumen	24.042.700,00	10,00	1,26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Peringkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Daerah Kabupaten Sampal Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Kabupaten sid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Pananggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6-12	15=14/5x100%	16			
33.	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	15 Laporan	1.629.608.253	3 Laporan	0	3 Laporan	429.991.000	1 Laporan	96.375.683	2 Laporan	152.994.445	2 Laporan	152.994.445	66,67	35,58	5 Laporan	152.994.445,0	33,33	9,39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
34.	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	60 Dokumen	2.004.884.637	12 Dokumen	229.364.000	12 Dokumen	466.668.500	3 Dokumen	57.800.000	6 Dokumen	167.040.000	6 Dokumen	167.040.000	50,00	35,79	18 Dokumen	396.404.000,0	30,00	19,77	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
35.	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	10 Dokumen	2.203.494.023	2 Dokumen	728.534.260	2 Dokumen	340.101.700	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	41.800.000	1 Dokumen	41.800.000	50,00	12,29	3 Dokumen	770.334.260,0	30,00	34,96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
36.	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	4.485.880.144	0 Orang	0	100 Orang	914.776.200	25 Orang	718.605.120	50 Orang	754.749.000	50 Orang	754.749.000	50,00	82,51	50 Orang	754.749.000,0	10,00	16,82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																45,24	25,99			40,48	18,04	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	500 %	12.883.720.222	0 %	1.263.969.154	100 %	3.532.745.300	25 %	191.010.300	50 %	476.108.550	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00		
37.	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO dan Beban	3840 Dokumen	1.811.742.441	0 Dokumen	0	768 Dokumen	482.367.600	192 Dokumen	107.250.000	384 Dokumen	141.876.000	384 Dokumen	141.876.000	50,00	29,41	384 Dokumen	141.876.000,0	10,00	7,83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
38.	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	90 Laporan	626.075.076	18 Laporan	96.447.352	18 Laporan	157.291.000	4 Laporan	6.440.000	8 Laporan	13.544.000	8 Laporan	13.544.000	44,44	8,61	26 Laporan	108.991.352,0	28,89	17,41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
39.	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3040 Laporan	624.389.967	608 Laporan	117.761.890	608 Laporan	127.463.100	151 Laporan	17.634.500	302 Laporan	35.414.500	302 Laporan	35.414.500	49,67	27,78	910 Laporan	153.176.390,0	29,93	24,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
40.	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.764.570.956	1 Dokumen	176.459.350	1 Dokumen	316.528.300	0 Dokumen	29.177.500	0 Dokumen	74.408.500	0 Dokumen	74.408.500	0,00	23,51	1 Dokumen	250.867.850,0	20,00	14,22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
41.	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	3.045.217.617	1 Dokumen	772.822.665	1 Dokumen	444.414.100	0 Dokumen	26.360.000	0 Dokumen	104.610.000	0 Dokumen	104.610.000	0,00	23,54	1 Dokumen	877.432.665,0	20,00	28,81	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
42.	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	5.011.724.165	100 Orang	101.477.897	100 Orang	2.004.681.200	25 Orang	4.148.300	50 Orang	106.255.550	50 Orang	106.255.550	50,00	5,30	150 Orang	207.733.447,0	30,00	4,14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																32,35	19,69			23,14	16,16	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan	Cakupan kelancaran penunjang urusan Kewenangan	500 %	1.655.208.028.964	100 %	243.621.448.455	100 %	312.477.353.375	25 %	49.484.060.000	50 %	87.635.904.280	50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00		
43.	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30 Laporan	1.510.917.079.384	6 Laporan	241.043.447.300	6 Laporan	305.046.166.000	1 Laporan	49.033.218.400	1 Laporan	86.719.272.000	1 Laporan	86.719.272.000	16,67	28,43	7 Laporan	327.762.719.300,0	23,33	21,69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampal Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sid Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Pananggun g Jawab																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		14=6+12		15=14/5x100%																						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																		
44.	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan	134.716.754.261	6 Laporan	1.203.971.500	6 Laporan	5.603.265.908	0 Laporan	0	2 Laporan	126.000.000					2 Laporan	126.000.000	33,33	2,25	8 Laporan	1.329.971.500,00	26,67	0,99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
45.	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	30 Laporan	9.574.196.319	6 Laporan	1.374.029.655	6 Laporan	1.827.921.467	2 Laporan	450.841.600	2 Laporan	790.632.280					2 Laporan	790.632.280	33,33	43,25	8 Laporan	2.164.661.935,00	26,67	22,61	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																27,78	24,64														25,56	15,10												
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah																	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																50,00	0,00																											
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah																											
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN INST-DAERAH	3 angka	17.124.197.273	2,6 angka	1.940.640.213	2,7 angka	3.656.389.400	2,7 angka	82.159.150	2,7 angka	708.174.810					2,7 angka	708.174.810	100,00	19,37	2,7 angka	708.174.810,0	90,00	4,14																			
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Mik Daerah	INDEKS PENGELOLAAN INST-DAERAH	3 angka	17.124.197.273	2,6 angka	1.940.640.213	2,7 angka	3.656.389.400	2,7 angka	82.159.150	2,7 angka	708.174.810					2,7 angka	0	100,00	0,00	2,7 angka	0,00	90,00	0,00																			
46.	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	1.228.642.996	2 Dokumen	120.129.500	2 Dokumen	238.774.800	1 Dokumen	9.514.800	0 Dokumen	218.602.800					1 Dokumen	218.602.800	50,00	91,55	3 Dokumen	338.732.300,00	30,00	27,57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
47.	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mik Daerah	300 Dokumen	3.579.330.466	60 Dokumen	72.036.400	60 Dokumen	755.971.400	15 Dokumen	8.151.400	30 Dokumen	78.867.640					30 Dokumen	78.867.640	50,00	10,43	90 Dokumen	150.904.040,00	30,00	4,22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
48.	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Mik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Mik Daerah	10 Dokumen	931.392.304	2 Dokumen	268.636.037	2 Dokumen	128.336.200	1 Dokumen	11.282.750	1 Dokumen	29.795.160					1 Dokumen	29.795.160	50,00	23,22	3 Dokumen	298.431.197,00	30,00	32,04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
49.	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Mik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Mik Daerah	150 Laporan	624.788.424	30 Laporan	107.253.500	30 Laporan	379.899.100	0 Laporan	0	14 Laporan	39.705.100					14 Laporan	39.705.100	46,67	10,45	44 Laporan	146.958.600,00	29,33	23,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
50.	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Mik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Mik Daerah	150 Laporan	2.910.921.320	30 Laporan	483.505.870	30 Laporan	601.170.500	7 Laporan	27.250.000	14 Laporan	69.174.000					14 Laporan	69.174.000	46,67	11,51	44 Laporan	552.679.870,00	29,33	18,99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
51.	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Mik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Mik Daerah	150 Laporan	281.073.651	30 Laporan	50.031.405	30 Laporan	49.641.500	0 Laporan	0	14 Laporan	21.087.210					14 Laporan	21.087.210	46,67	42,48	44 Laporan	71.118.615,00	29,33	25,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
52.	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Mik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Mik Daerah	150 Dokumen	2.565.941.556	30 Dokumen	322.976.850	30 Dokumen	462.858.200	7 Dokumen	3.750.000	14 Dokumen	20.352.000					14 Dokumen	20.352.000	46,67	4,40	44 Dokumen	343.328.850,00	29,33	13,38	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
53.	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Mik Daerah	Jumlah Laporan Barang Mik Daerah yang Disusun	150 Laporan	4.449.111.956	30 Laporan	443.081.587	30 Laporan	943.926.000	7 Laporan	10.115.200	14 Laporan	198.132.900					14 Laporan	198.132.900	46,67	20,99	44 Laporan	641.214.487,00	29,33	14,41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
54.	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Mik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Mik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	450 Orang	552.994.599	90 Orang	72.989.064	90 Orang	95.811.700	22 Orang	12.095.000	44 Orang	32.458.000					44 Orang	32.458.000	48,89	33,88	134 Orang	105.447.064,00	29,78	19,07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																48,02	27,66																											
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah																											
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																100,00	0,00																											
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah																											
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PBB P-2 BPHTB, Persentase Penerimaan PAD selain PBB-P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	500 %	16.065.765.629	100 %	1.684.605.668	100 %	4.011.163.200	25 %	716.189.419	50 %	993.842.990					50 %	993.842.990	50,00	24,78	50 %	993.842.990,00	10,00	6,19																			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Lancarnya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	500 %	16.065.765.629	100 %	1.684.605.668	100 %	4.011.163.200	25 %	716.189.419	50 %	993.842.990					50 %	0	50,00	0,00	50 %	0,00	10,00	0,00																			

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Peringkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2025 Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Daerah Kabupaten Sampal Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Peringkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
55.	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	1.715.629.713	2 Dokumen	358.918.028	2 Dokumen	383.337.800	1 Dokumen	29.457.037	1 Dokumen	69.628.719					1 Dokumen	69.628.719	50,00	18,16	3 Dokumen	428.546.747,00	30,00	24,98	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
56.	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15 Laporan	3.964.090.516	3 Laporan	123.697.015	3 Laporan	1.043.001.800	1 Laporan	389.648.600	2 Laporan	406.118.600					2 Laporan	406.118.600	66,67	38,94	5 Laporan	529.815.615,00	33,33	13,37	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
57.	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	2.273.728.450	1 Laporan	205.578.517	1 Laporan	619.194.200	1 Laporan	100.427.600	1 Laporan	142.646.100					1 Laporan	142.646.100	100,00	23,04	2 Laporan	348.224.617,00	40,00	15,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
58.	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	210000 Objek Pajak	1.234.661.195	42000 Objek Pajak	205.994.201	42000 Objek Pajak	328.996.400	96 Objek Pajak	31.836.800	10596 Objek Pajak	71.983.300					10596 Objek Pajak	71.983.300	25,23	21,88	52596 Objek Pajak	277.977.501,00	25,05	22,51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
59.	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindak Lanjuti dan Belum Ditindak Lanjuti	3500 Laporan	2.126.621.372	3500 Laporan	240.946.107	3500 Laporan	949.593.000	28 Laporan	35.671.556	43 Laporan	131.585.245					43 Laporan	131.585.245	1,23	13,86	3543 Laporan	372.531.352,00	101,23	17,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
60.	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60 Dokumen	528.222.957	12 Dokumen	94.979.850	12 Dokumen	91.693.600	3 Dokumen	44.019.400	6 Dokumen	45.859.400					6 Dokumen	45.859.400	50,00	50,01	18 Dokumen	140.839.250,00	30,00	26,66	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
61.	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	60 Dokumen SSPD	1.362.164.403	12 Dokumen SSPD	221.529.300	12 Dokumen SSPD	261.714.200	3 Dokumen SSPD	21.973.800	6 Dokumen SSPD	44.674.000					6 Dokumen SSPD	44.674.000	50,00	17,07	18 Dokumen SSPD	266.203.300,00	30,00	19,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
62.	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindak Lanjuti	60 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	977.121.334	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	82.831.950	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	142.852.800	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	48.627.800	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	56.949.800					1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	56.949.800	8,33	39,87	13 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	139.781.750,00	21,67	14,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
63.	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	60 Dokumen LHP	1.883.525.689	12 Dokumen LHP	150.130.700	12 Dokumen LHP	190.779.400	3 Dokumen LHP	14.526.826	6 Dokumen LHP	24.397.826					6 Dokumen LHP	24.397.826	50,00	12,79	18 Dokumen LHP	174.528.526,00	30,00	9,27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															44,61	26,18			37,92	18,16						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															50,00	0,00			10,00	0,00						
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)															84,41	27,63			68,73	5,73						
Predikat Kinerja (Program)															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)															46,54	28,58			35,07	15,38						
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
				Jumlah Anggaran dari seluruh Program				369.620.937,81		68.414.924,81		102.749.367,01					102.749.367,01									
Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja			Pelaksanaan beberapa kegiatan mencapai 100%																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			Masih ada beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi di triwulan II																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya			Agar triwulan berikutnya bisa terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan																							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, penetapan peraturan APBD yang tepat waktu dan pengelolaan milik daerah yang tertib administrasi.
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian 2022	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	-	-	6 %	6%	7 %	7 %	8 %	6%	6%	6%	
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	-	-	8 %	8 %	9 %	9 %	10 %	8%	8 %	8 %	
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	85 %	65 %	70 %	80 %	90 %	85%	65 %	65 %	
	IPM Penatausahaan Keuangan	-	-	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	-	-	B (69,95)	BB (73)	BB (74)	BB (75)	A (81)	B (69,95)	B (69,95)	BB (73)	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2023 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SOPD kami dan pada perkembangan regulasi dan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan yang menyangkut dengan pengelolaan aset negara menyebabkan daerah harus menindaklanjutinya dengan melakukan terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Kerja Pemerintahan di daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan tersebut, terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Adapun tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. **Strength (Kekuatan)**

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah

melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Balangan.
- 2) Adanya diklat, seminar, bimtek, workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1). Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2). Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 3). Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 4). Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 5). Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis

- akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
 4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
 5. Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah;
 6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
 7. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;

Berdasarkan isu-isu penting tersebut di atas, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan terutama dalam hal SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung.

- **Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

- **Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan teknologi informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan perubahan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS Perubahan yang ditetapkan. Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

**MATRIK ASISTENSI RENJA PERUBAHAN 2023 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROG RAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	72 (BB) Nilai	28.500.359.242	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	72 (BB) Nilai	28.865.630.842	365.271.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	286.482.400	Lancarnya kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	266.957.800	-19.524.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	51.349.700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	52.021.800	672.100	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	161.880.100	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	134.483.400	-27.396.700	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Laporan	73.252.600	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Laporan	80.452.600	7.200.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan perangkat	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	100 %	14.388.297.642	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	100 %	14.436.428.742	48.131.100	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

	daerah	dan Aset Daerah				Aset Daerah					DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	696 Orang/Bulan	13.738.181.342	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	696 Orang/Bulan	13.908.897.342	170.716.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Dokumen	130.985.800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Dokumen	146.795.000	15.809.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	65.125.500	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	70.736.700	5.611.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	454.005.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	309.999.700	-144.005.300	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.613.960.200	Lancarnya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	1.667.447.400	-946.512.800	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	163.648.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	233.648.000	70.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	200 Orang	67.312.200	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	200 Orang	350.799.400	283.487.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	Undangan	dan Aset Daerah				Aset Daerah					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	320 Orang	2.383.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	320 Orang	1.083.000.000	-1.300.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	1.653.560.200	Lancarnya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	4.515.732.700	2.862.172.500	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	92.394.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	142.989.200	50.595.100	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	1.221.760.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	2.363.718.500	1.141.958.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	15.490.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Paket	33.213.000	17.722.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	360 Dokumen	31.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	360 Dokumen	31.500.000	0	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	346 Laporan	292.415.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	346 Laporan	1.944.312.000	1.651.897.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	100 %	5.990.000.000	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	4.990.000.000	-1.000.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

		Daerah									
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38 Unit	5.990.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	38 Unit	4.990.000.000	-1.000.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	1.213.889.000	Lancarnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	1.320.063.600	106.174.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	576.968.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	701.968.000	125.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	147.921.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	172.921.000	25.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	489.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Laporan	445.174.600	-43.825.400	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.354.169.800	Lancarnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	1.669.000.600	-685.169.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20 Unit	789.791.400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20 Unit	999.791.400	210.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10 Unit	669.440.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10 Unit	57.500.000	-611.940.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20 Unit	894.938.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20 Unit	611.709.200	-283.229.200	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		87 %	309.853.037.350	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		87 %	322.987.754.375	13.134.717.025	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.810.984.900	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.987.984.900	177.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	146.020.000	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	145.743.000	-277.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	144.770.000	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	113.810.000	-30.960.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	961.133.000	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	973.853.000	12.720.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	36.860.000	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	82.321.000	45.461.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan	Badan Pengelolaan Keuangan,	2 Dokumen	323.800.000	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala	Badan Pengelolaan Keuangan,	2 Dokumen	421.780.000	97.980.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pendapatan dan Aset Daerah			Daerah tentang Penjabaran APBD	Pendapatan dan Aset Daerah					DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	321.120.000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	245.926.000	-75.194.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	877.281.900	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	1.004.551.900	127.270.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Sistem Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.967.715.800	Meningkatnya Sistem Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	3.989.670.800	1.021.955.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	481.890.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	377.590.000	-104.300.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	81.571.400	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	197.571.400	116.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 Dokumen	412.532.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 Dokumen	1.262.972.000	850.440.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3 Laporan	351.133.000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3 Laporan	429.991.000	78.858.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	374.237.500	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	466.668.500	92.431.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	299.775.700	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	340.101.700	40.326.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan	Badan Pengelolaan Keuangan,	100 Orang	966.576.200	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	Badan Pengelolaan Keuangan,	100 Orang	914.776.200	-51.800.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

	Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendapatan dan Aset Daerah			Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendapatan dan Aset Daerah					DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	2.503.525.000	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	3.532.745.300	1.029.220.300	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	768 Dokumen	390.377.600	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	768 Dokumen	482.367.600	91.990.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18 Laporan	134.900.900	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18 Laporan	157.291.000	22.390.100	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	608 Laporan	105.033.100	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	608 Laporan	127.463.100	22.430.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Dokumen	340.438.700	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Dokumen	316.528.300	-23.910.400	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	1 Dokumen	478.421.400	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Dokumen	444.414.100	-34.007.300	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	Pelaksanaan APBD	Daerah									
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 Orang	1.054.353.300	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 Orang	2.004.681.200	950.327.900	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan kelancaran penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	301.570.811.650	Cakupan kelancaran penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	312.477.353.375	10.906.541.725	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	273.417.264.000	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	305.046.166.000	31.628.902.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	26.386.663.150	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	5.603.265.908	-20.783.397.242	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	1.766.884.500	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6 Laporan	1.827.921.467	61.036.967	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40 %	3.203.370.400	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40 %	3.656.389.400	453.019.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40 %	3.203.370.400	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40 %	3.656.389.400	453.019.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	2 Dokumen	238.774.800	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	2 Dokumen	238.774.800	0	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

		dan Aset Daerah				Aset Daerah					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	60 Dokumen	753.571.400	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	60 Dokumen	755.971.400	2.400.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	139.136.200	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	128.336.200	-10.800.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	108.460.100	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	379.899.100	271.439.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	508.150.500	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	601.170.500	93.020.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	49.641.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	49.641.500	0	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	452.858.200	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Dokumen	462.858.200	10.000.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	856.966.000	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	30 Laporan	943.926.000	86.960.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	90 Orang	95.811.700	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	90 Orang	95.811.700	0	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	Milik Daerah Kabupaten/Kota	dan Aset Daerah			Pemerintah Kabupaten/Kota	Aset Daerah					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PBB P-2 BPHTB, Persentase Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	3.057.639.600	Persentase PBB P-2 BPHTB, Persentase Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	4.011.163.200	953.523.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Lancarnya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	3.057.639.600	Lancarnya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100 %	4.011.163.200	953.523.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	288.761.800	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2 Dokumen	383.337.800	94.576.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3 Laporan	822.044.800	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3 Laporan	1.043.001.800	220.957.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Laporan	435.130.500	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1 Laporan	619.194.200	184.063.700	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	42000 Objek Pajak	214.859.900	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	42000 Objek Pajak	328.996.400	114.136.500	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindak Lanjuti dan Belum Ditindak Lanjuti	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3500 Laporan	402.976.400	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindak Lanjuti dan Belum Ditindak Lanjuti	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3500 Laporan	949.593.000	546.616.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	91.327.000	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen	91.693.600	366.600	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya W/P yang Memiliki Piutang Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen SSPD	243.875.200	Jumlah Dokumen Tertagihnya W/P yang Memiliki Piutang Pajak	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen SSPD	261.714.200	17.839.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindak Lanjuti	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	189.242.800	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindak Lanjuti	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	142.852.800	46.390.000	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen LHP	369.421.200	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12 Dokumen LHP	190.779.400	178.641.800	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jumlah Anggaran dari seluruh Program				344.614.406.592				359.520.937.817	14.906.531.225	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan maupun keluhan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari masyarakat diperoleh melalui beberapa cara yaitu, penyampaian langsung kepada petugas maupun melalui telepon. Beberapa usulan yang diinginkan oleh masyarakat sebagian besar berharap bahwa adanya peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat di kabupaten Balangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap penegakan Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu : “MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu : “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”. Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Balangan maka di dalam RPJMD Kabupaten Balangan tertuang Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuannya adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.

Sasarannya adalah : Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan yaitu : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase aset daerah yang tertib	angka	2,60	2,70	2,80	2,90	3
		Persentase peningkatan pendapatan	%	100	100	100	100	100
Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Predikat	B (69.95)	BB (73)	BB (74)	BB (75)	A (81)

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kearifan. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, di mana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan buatan orang perorang ataupun kelompok Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah "ruh" ideologi akan memiliki "raga", keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata "berdaulat, mandiri dan berkepribadian" adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri;
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibiayai oleh APBD, yang disusun melalui perencanaan anggaran terdiri dari sumber pendanaan dan penggunaan dana/anggaran. Sumber pendanaan berasal dari PAD, dana bagi hasil/perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk penerimaan pembiayaan. Sedangkan penggunaan dana terkonsep dalam konsep penganggaran terpadu (*unifield budgeting*) yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Efisiensi alokasi dana dan pencegahan terhadap duplikasi belanja dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu : “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Balangan maka di dalam RPJMD Kabupaten Balangan tertuang Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuannya adalah :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.

Sasarannya adalah :

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan menyeluruh dan terpadu mengenai upaya- upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan yaitu :

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

PENAMBAHAN PAGU SETELAH PERUBAHAN 2023				
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
KABUPATEN BALANGAN				
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Jumlah Penambahan(+/-)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.359.242	28.865.630.842	365.271.600
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.482.400	266.957.800	-19.524.600
1,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.349.700	52.021.800	672.100
2,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.880.100	134.483.400	-27.396.700
3,	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.252.600	80.452.600	7.200.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.388.297.642	14.436.428.742	48.131.100
4,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.738.181.342	13.908.897.342	170.716.000
5,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.985.800	146.795.000	15.809.200
6,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.125.500	70.736.700	5.611.200
7,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	454.005.000	309.999.700	-144.005.300
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.613.960.200	1.667.447.400	-946.512.800
8,	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163.648.000	233.648.000	70.000.000
9,	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.312.200	350.799.400	283.487.200
10,	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.383.000.000	1.083.000.000	-1.300.000.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.653.560.200	4.515.732.700	2.862.172.500
11,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.394.100	142.989.200	50.595.100
12,	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.221.760.300	2.363.718.500	1.141.958.200
13,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.490.800	33.213.000	17.722.200
14,	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.500.000	31.500.000	0
15,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.415.000	1.944.312.000	1.651.897.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.990.000.000	4.990.000.000	-1.000.000.000
16,	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.990.000.000	4.990.000.000	-1.000.000.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.889.000	1.320.063.600	106.174.600
17,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.968.000	701.968.000	125.000.000
18,	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.921.000	172.921.000	25.000.000
19,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.000.000	445.174.600	-43.825.400
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.169.800	1.669.000.600	-685.169.200
20,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	789.791.400	999.791.400	210.000.000
21,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	669.440.000	57.500.000	-611.940.000
22,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	894.938.400	611.709.200	-283.229.200

B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	309.853.037.350	322.987.754.375	13.134.717.025
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.810.984.900	2.987.984.900	177.000.000
23,	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	146.020.000	145.743.000	-277.000
24,	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	144.770.000	113.810.000	-30.960.000
25,	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	961.133.000	973.853.000	12.720.000
26,	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.860.000	82.321.000	45.461.000
27,	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.800.000	421.780.000	97.980.000
28,	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	321.120.000	245.926.000	-75.194.000
29,	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	877.281.900	1.004.551.900	127.270.000
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.967.715.800	3.989.670.800	1.021.955.000
30,	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	481.890.000	377.590.000	-104.300.000
31,	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	81.571.400	197.571.400	116.000.000
32,	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	412.532.000	1.262.972.000	850.440.000
33,	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	351.133.000	429.991.000	78.858.000
34,	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	374.237.500	466.668.500	92.431.000
35,	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	299.775.700	340.101.700	40.326.000
36,	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	966.576.200	914.776.200	-51.800.000
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.503.525.000	3.532.745.300	1.029.220.300
37,	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	390.377.600	482.367.600	91.990.000
38,	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	134.900.900	157.291.000	22.390.100
39,	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	105.033.100	127.463.100	22.430.000
40,	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	340.438.700	316.528.300	-23.910.400
41,	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	478.421.400	444.414.100	-34.007.300

42,	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.054.353.300	2.004.681.200	950.327.900
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	301.570.811.650	312.477.353.375	10.906.541.725
43,	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	273.417.264.000	305.046.166.000	31.628.902.000
44,	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	26.386.663.150	5.603.265.908	-20.783.397.242
45,	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.766.884.500	1.827.921.467	61.036.967
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.203.370.400	3.656.389.400	453.019.000
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.203.370.400	3.656.389.400	453.019.000
46,	Penyusunan Standar Harga	238.774.800	238.774.800	0
47,	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	753.571.400	755.971.400	2.400.000
48,	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	139.136.200	128.336.200	-10.800.000
49,	Inventarisasi Barang Milik Daerah	108.460.100	379.899.100	271.439.000
50,	Pengamanan Barang Milik Daerah	508.150.500	601.170.500	93.020.000
51,	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.641.500	49.641.500	0
52,	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	452.858.200	462.858.200	10.000.000
53,	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	856.966.000	943.926.000	86.960.000
54,	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	95.811.700	95.811.700	0
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.057.639.600	4.011.163.200	953.523.600
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.057.639.600	4.011.163.200	953.523.600
55,	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	288.761.800	383.337.800	94.576.000
56,	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	822.044.800	1.043.001.800	220.957.000
57,	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	435.130.500	619.194.200	184.063.700
58,	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	214.859.900	328.996.400	114.136.500
59,	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.976.400	949.593.000	546.616.600

60,	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	91.327.000	91.693.600	366.600
61,	Penagihan Pajak Daerah	243.875.200	261.714.200	17.839.000
62,	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	189.242.800	142.852.800	-46.390.000
63,	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	369.421.200	190.779.400	-178.641.800
Jumlah Anggaran dari seluruh Program		344.614.406.592	359.520.937.817	14.906.531.225

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang telah ditetapkan merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelarasan program/kegiatan pada Perubahan Renja 2023 lebih bersifat prioritas dan mendesak untuk diakomodir sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan ini sebagai penyesuaian atas proyeksi serta dinamika yang terjadi sampai akhir tahun anggaran, dan dipergunakan sebagai acuan kinerja dalam melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, sehingga rencana kerja dapat lebih terarah dan terukur sesuai perencanaan dan kaidah yang ada. Dan ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan, dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, disertai kerja keras dan dedikasi tinggi dari segenap aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Paringin, Juli 2023
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kab. Balangan



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP. 19780601 200501 1 016